ISLAMIC HIGHER EDUCATION CURRICULUM BASED ON INDONESIA NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORK (KKNI)

Prof.Dr.Ali Mufrodi, MA.

ABSTRACT

The Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 8 of 2012 on the National Qualifications Framework for Indonesia (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/KKNI), which was passed on January 17, 2012, and has been published in the Gazette of the Republic of Indonesia of 2012 number 24, must be note. This is noteworthy because in the future humans will be seen to Indonesia where his education, which will determine the level or the level of qualifications they have. Indonesia's National Qualifications Framework that has been socialized, although it is not yet complete in Indonesia, consists of nine levels (level), starting from the first qualifying as a qualification to qualification to the lowest-9 as the highest qualification. Qualification level is the level of learning achievement, which is based on the size of the education and / or training acquired through formal education, nonformal, informal, or work experience. Qualification on KKNI describe the learning outcomes obtained by a person through education, training, work experience, and independent learning.

The first level up to the third level are grouped at the operator position, levels are grouped in the fourth to the sixth position technicians or analysts, and the level of the seventh to the ninth entry in a professional career. Basic education graduates are at the first level, graduates of secondary education are the lowest on the second level, a diploma graduates is at the lowest level 3, a graduate diploma 2 are the lowest on the ladder of four, a graduate diploma three lowest levels are at 5, and graduates 4 or a graduate diploma and applied degree is at the lowest level of 6. Graduates of professional education equivalent to level 7 and 8, a graduate degree and masters of applied equivalent to the lowest level 8, and applied doctoral graduate or doctorate level equivalent to 9, as well as graduate education specialist levels equivalent to 8 and 9.With the enactment of competence through qualifications hierarchy KKNI these adjustments must be made within 5 years.

The problem, among others, have Islamic Higher Education (IHE) which is under the auspices of the Ministry of Religious Affairs has been prepared to make adjustments? If not, then the Directorate of Islamic Education under the Director General of Islamic

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Education will have great job in the next five years. How many courses that have to adjust the desired qualifications in KKNI? The faculty or department that is under the auspices of the Ministry of Religious Affairs have 1284 pieces, consisting of 249 faculty / department under PTAIN (State Islamic University) and 1035 are in PTAIS (Private Islamic University). Faculty or department that manages as many as 931 courses (Prodi) in 1309 PTAIN and Prodi on PTAIS, so there are 2243 in number Prodi. Two thousand two hundred forty-study program must conform to the qualifications KKNI, which means having to adjust the curriculum with learning outcomes. The implementation of adjustment programs as quickly the next 5 years can be planned. Among others is to socializise KKNI through PTAIN and PTAIS. After that, many Prodi at the institutions making the curriculum adjusted to the desired learning outcomes. The results of making the curriculum adjusted to KKNI must be discusse in the seminar to complete the new curriculum. Finally, the Ministry of Religious Affairs approve the curriculum for the seminar were implemented nationally.

Pendahuluan

Presiden Republik Indonesia telah memutuskan peraturan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada 17 Januari 2012 sebagai Peraturan Presiden no.8 Tahun 2012, yang bertujuan memberi arah tenaga kerja Indonesia. Kerangka Kualifikasi Nasional tersebut menjadi dasar bagi penyusunan kurikulum perguruan tinggi yang harus dilaksanakan dalam jangka lima tahun mendatang. Kerangka Kualifikasi tersebut memfokuskan kepada capaian pembelajaran (*learning out comes*) untuk suatu jenjang pendidikan. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia terdiri dari 9 jenjang, mulai dari kualifikasi pertama sebagai jenjang yang terendah hingga kualifikasi ke-9 sebagai jenjang tertinggi. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran, yang disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.

Kurikulum di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) harus ditata ulang dan dipersiapkan bagi peserta didik dengan bekal ilmu yang direncanakan oleh lembaga pendidikan tinggi tersebut.

Pada saat ini, menurut data terbaru yang diunduh 11 Oktober 2012, terdapat 2.243 program studi (prodi) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Program studi sebanyak itu tersebar luas pada 1.284 fakultas baik negeri maupun swasta.[356] Program-program studi yang dikelola oleh PTAI tersebut harus meredesign kurikulumnya agar sesuai dengan KKNI. Tentu ini merupakan kerja

[356] http://www.ranking-ptai.info/Lbg&Fak&ProPtai/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar yang harus dikerjakan bersama. Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, diharapkan membuat kebijakan umum tentang kurikulum berbasis KKNI yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat yang ada di bawahnya hingga ke fakultas-fakultas beserta program-program studinya untuk mengimplementasikan kurikulum tersebut.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Dalam Bab I Ketentuan Umum Peraturan Presiden tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan KKNI ialah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Kualifikasi ialah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. Sedangkan capaian pembelajaran ialah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja. Pengalaman kerja ialah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi. Kompetensi kerja dinilai dengan sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. Sertifikat kompetensi kerja ialah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Sedangkan profesi ialah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.

Dalam Bab II Peraturan Presiden itu berbunyi bahwa KKNI terdiri dari 9 jenjang. Jenjang 1- 3 dikelompokkan dalam jabatan operator. Jenjang 4 – 6 merupakan kelompok jabatan teknisi atau analis, sedangkan jenjang 7 – 9 adalah kelompok jabatan ahli. Setiap jenjang kualifikasi memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.

Penyetaraan capaian pembelajaran dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI sebagaimana berikut: a. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1. b. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2, c. lulusan Diploma 1 paling rendah setar dengan jenjang 3, d. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4, e. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5, f. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6, g. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8, h. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9, i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8, dan j. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.[357]

Jenjang-jenjang dalam KKNI itu lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini:[358]

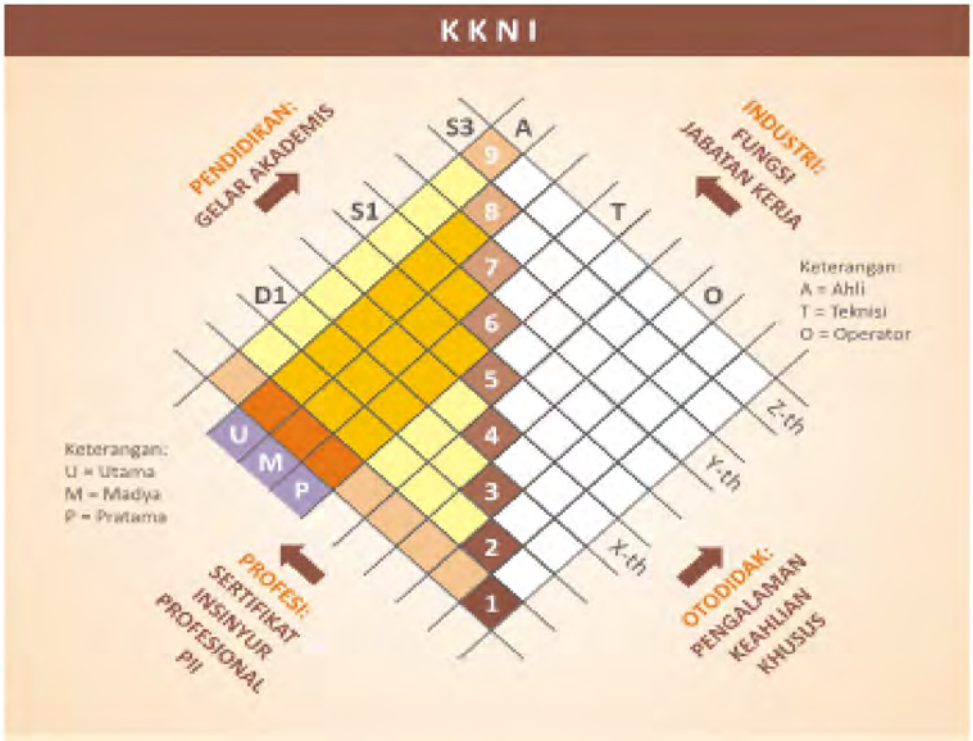

Dalam lampiran Peraturan Presiden tersebut dinyatakan deskripsi tiap jenjang. Umpamanya, jenjang kualifikasi 1: mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya. Memiliki pengetahuan faktual, dan bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri serta tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Selanjutnya akan dilihat jenjang kualifikasi 6 sampai 9, karena relevansinya jenjang tersebut dengan kepentingan PTAI, yakni tamatan sarjana, magister dan doktor.

Jenjang 6 memiliki : kemampuan mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di bidangnya dalam

[357] http://www.dikti.go.id/files/atur/KKNI/Perpres8-2012-KKNI.pdf

[358] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010/2011 Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA*, Jakarta, 2011, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi dengan situasi yang dihadapi. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Jenjang 7: mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

Jenjang 8: mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Jenjang 9: mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.[359]

Capaian pembelajaran atau *learning out comes* PTAI diharapkan memiliki kompetensi sebagaimana dalam jenjang-jenjang KKNI tersebut. Umpamanya, lulusan S1 atau sarjana PTAI berada pada jenjang/level 6 tersebut harus mampu mengaplikasikan bidang keahliannya, yakni ilmu Agama Islam. Ia juga harus dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan agama tersebut, dengan menggunakan teknologi, dan/atau seni di bidang ilmu agama itu untuk menyelesaikan masalah. Ia juga harus

[359] http://www.depdagri.go.id/media/documents/2012/02/03/f/i/-1.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu beradaptasi dengan situasi masyarakat yang dihadapinya. Ia juga harus menguasai konsep teoritis bidang ilmu Agama Islam secara umum dan konsep teoritis bagian-bagian khusus ilmu agama tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Lulusan prodi Sejarah dan Peradaban Islam (SPI) umpamanya, harus mampu menguasai bidang kesejarahan Islam khususnya secara mendalam, di samping penguasaan atas ilmu keislaman secara umum (fiqh, tauhid, al-Qur'an, al-Hadis dan lain-lain). Lulusan S1 PTAI harus mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data yang diperolehnya, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri atau berkelompok. Ia harus bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Nah, kurikulum S1 perguruan tinggi tersebut harus diarahkan ke jenjang 6 tersebut sesuai dengan konsep KKNI.

KURIKULUM

Kurikulum ialah dokumen perencanaan tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi yang harus dilakukan peserta didik, strategi dan cara yang dapat dilembagakan, evaluasi dan implementasi dokumen dalam bentuk nyata. Kurikulum meliputi 4 hal, yakni: *1. planned learning experiences, 2. offered within an educational institution/programme, 3. represented as a document, 4. includes experiences resuting from implementing that document.*

Kurikulum memiliki 3 peran: 1. konservatif, 2. kreatif, 3. kritis dan evaluatif. Peran konservatif ialah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Dengan peran konservatif, kurikulum berperan menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga keajekan dan identitas masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik. Peran kreatif ialah kurikulum yang mampu menjawab setiap tantangan zaman yang selalu berubah secara dinamis. Dalam hal ini kurikulum harus mengandung sesuatu yang baru yang dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan potensinya agar bisa berperan aktif dalam masyarakat yang berubah dengan cepat. Kurikulum berperan untuk menyeleksi dan mengevaluasi nilai budaya mana yang harus dipertahankan dan budaya baru yang harus diberikan kepada peserta didik.

Kurikulum memiliki 4 fungsi, yakni: 1. fungsi pendidikan umum, 2. suplementasi, 3. eksplorasi, 4. keahlian. Fungsi pendidikan umum kurikulum ialah untuk mempersiapkan peserta didik agar supaya mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Tiap-tiap peserta didik memiliki perbedaan kemampuan, minat, maupun bakat. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap peserta didik sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perbedaannya tersebut. Fungsi eksplorasi kurikulum ialah bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing peserta didik. Kurikulum juga berfungsi untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keahliannya berdasarkan atas minat dan bakatnya.

Ahli yang lain, Alexander Inglis, sebagaimana dikutip oleh Sanjaya mengatakan bahwa kurikulum memiliki 6 fungsi, yakni: 1. fungsi penyesuaian, 2. integrasi, 3. diferensiasi, 4. persiapan, 5. pemilihan, 6. diagnostik. Fungsi penyesuaian ialah kurikulum harus dapat mengantar peserta didik agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Fungsi integrasi ialah bahwa kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi peserta didik secara utuh. Kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik harus berkembang secara terintegrasi. Fungsi diferensiasi ialah bahwa kurikulum harus dapat melayani setiap peserta didik dengan segala keunikannya. Persiapan ialah kurikulum yang harus dapat memberikan pengalaman belajar peserta didik baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maupun untuk kehidupan di masyarakat. Fungsi pemilihan ialah kurikulum yang dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Sedangkan fungsi diagnostik ialah kurikulum untuk mengenal berbagai kelemahan dan kekuatan peserta didik.

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum setiap mata kuliah pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud ialah Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sesuai dengan yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan.[360]

Menurut Hamanik kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Kurikulum memuat isi dan materi, juga memuat rencana pembelajaran, serta pengalaman belajar yang meliputi belajar di kelas dan di di luar kelas.

Kurikulum dapat dikembangkan berdasarkan: a. tujuan filsafat dan pendidikan nasional, b. sosial, budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat, c. perkembangan peserta didik, d. keadaan lingkungan, e. kebutuhan pembangunan, f. perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan komponen kurikulum ada 5 hal yang saling berhubungan, yakni: tujuan, materi, metode, organisasi dan evaluasi.

Pengembangan kurikulum memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: prinsip orientasi pada tujuan, relevansi/kesesuaian dengan kebutuhan, efisiensi dan efektifitas, fleksibilitas/keluwesan, kesinambungan/kontinuitas, keseimbangan, keterpaduan, dan

[360] Wina Sanjaya, *Kurikulum Pembelajaran*, Jakarta, Kencana Prenada, cet.iii, 2010, 1 dst.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermutu.[361] Dari pengertian dan teori-teori tentang kurikulum di atas, sudah waktunya kurikulum yang ada di PTAI untuk diadakan perubahan dan pengembangan sesuai dengan KKNI.

Kurikulum PTAI

Kurikukum yang ada pada PTAI baik negeri maupun swasta mengacu pada kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, yang berbasis pada pedoman penyusunan kurikulum dari Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas). Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendiknas nomor 232 tahun 2000 dikemukakan struktur kurikulum perguruan tinggi yang bertujuan: *a. learning to know, b. learning to do, c. learning to live together*, dan *d. learning to be.* Mata kuliah yang ada di perguruan tinggi sebagai implementasi dari kurikulum nasional disusun menjadi 5 kelompok: a.Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), b. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), d. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), e. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Kurikulum tersebut berbasis pada kompetensi, walau tidak dikatakan demikian secara eksplisit dalam SK.

Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002 mengatur lagi masalah kurikulum perguruan tinggi. Inilah yang dijadikan landasan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), yang meliputi kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kompetensi yang dimaksud dalam SK tersebut ialah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. SK Mendiknas no.232/2000 hampir sama dengan SK 045/2002. Lima kelompok mata kuliah dalam SK Mendiknas nomor 232/2000 itu dikatakan sebagai elemen-elemen kompetensi dalam SK 045/2002. Kurikulum inti merupakan kompetensi utama dan kurikulum institusional sebagai kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.

Kurikulum inti yang menjadi ciri-ciri kompetensi utama bersifat: a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan prodi, c. berlaku secara nasional dan internasional, d. lentur, akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang, e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.

Dengan adanya kurikulum baru yang berbasis pada kompetensi itu, maka sistem penilaian juga berubah. Yakni meliputi aspek-aspek: a. penilaian hasil belajar, b. penilaian proses belajar mengajar, c. penilaian kompetensi mengajar dosen, d. penilaian

[361] Oemar Hamanik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta, Bumi Aksara, cet.xii, 2011, 16-32. Lihat pula Endah Sulistyowati, *Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter*, Jogjakarta, Citra Aji Parama, 2012, 79-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

relevansi kurikulum, e. penilaian daya dukung sarana dan fasilitas, f. penilaian program (akreditasi). Kurikulum Berbasis Kompetensi ini diberlakukan bagi semua tingkat pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi sejak tahun 2004.[362]

Menurut Arif Furqan, kurikulum itu bagaikan jasa layanan yang "dijual" pada masyarakat. Oleh karena masyarakat akan "membeli" kurikulum itu, maka kurikulum harus dikemas sedemikian rupa agar masyarakat yakin bahwa mereka tidak akan merugi belajar di lembaga pendidikan tersebut. Kurikulum perguruan tinggi seharusnya memuat: a. misi perguruan tinggi, b. visi ke depan, c. tujuan kurikuler, d. profil lulusan, e. pendekatan yang diambil dalam proses pendidikan, f. aspek kepribadian mahasiswa yang dikembangkan, g. program studi yang dikembangkan di perguruan tinggi tersebut, h. daftar mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa, i. deskripsi mata kuliah, j. sistem evaluasi yang diterapkan, k. sistem perkuliahan yang diterapkan di perguruan tinggi tersebut. Menurut Furqan lebih lanjut, haruslah disusun buku pedoman pelaksanaan kurikulum di setiap PTAI agar supaya masyarakat tahu ke mana perguruan tinggi itu diarahkan, bagaimana caranya, dan bagaimana mengevaluasi keberhasilannya.[363]

Perguruan Tinggi Agama Islam yang saat ini memiliki 1.284 fakultas dan mengelola 2.243 prodi itu menggunakan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tersebut. Dalam implementasinya, kurikulum IAIN Sunan Ampel Surabaya misalnya, disusun dalam kompetensi dasar, kompetensi utama dan kompetensi tambahan/pendukung. Kompetensi dasar ada 34 SKS (Satuan Kredit Semester), yang harus dipelajari oleh mahasiswa di semua fakultas dan semua prodi atau jurusan. Kompetensi utama dan tambahan bisa sampai 126 SKS, yang penting jumlah semua SKS -dasar, utama dan tambahan- tidak lebih dari 160 SKS.[364] Kompetensi dasar dan utama adalah kompetensi inti kalau dilihat dalam konsep KBK. Sedangkan kompetensi tambahan/pendukung masuk ke kompetensi institusional.

Dilihat dari kurikulum yang ada seperti di IAIN Sunan Ampel, mahasiswa yang telah lulus dari almamaternya diharapkan menjadi anggota masyarakat yang berakhlaqul karimah, secara akademik dan profesional, dan mampu menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman. Lulusan itu juga diharapkan menyebarkan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan

---

[362] *Swara Ditpertais*: No.17 Th.II, 18 Oktober 2004, *download* dari http://www.ditpertais.net/swara/warta10-02.asp

[363] Arif Furqan, *Anatomi Problem Kurikulum di PTAI*, *download* dari http://www.ditpertais.net/artikel/arief02.asp

[364] IAIN Sunan Ampel, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Tahun 2011*, Surabaya, 2011, 67-135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.[365] Tentu harapan itu masih abstrak, belum membumi betul. Lewat kurikulum itulah tujuan pendidikan itu diwujudkan, dan kurikulum tersebut harus disesuaikan dengan KKNI.

Kurikulum PTAI Berbasis KKNI

Bagaimana model kurikulum PTAI yang harus diredesign sesuai dengan KKNI? Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia mengharuskan pendidikan terfokus ke *learning out comes,* capaian pembelajaran agar peserta didik dapat bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan mendapat pengakuan baik nasional maupun internasional. Dalam kata lain, mau dijadikan apa mahasiswa yang dididik dalam suatu lembaga pendidikan itu. Di sini, tujuan pendidikan harus jelas, dan otomatis kurikulumnya harus jelas pula. Tamatan sarjana akan berbeda kompetensinya dengan lulusan magister ataupun doktor, sebagaimana terlihat dalam lampiran Perpres no.8 tahun 2012 tersebut.

Di bawah ini dipaparkan contoh kurikulum bidang pertanian berbasis KKNI untuk membuat kurikulum bagi prodi di PTAI. Contoh kurikulum bidang pertanian ini dikemukakan untuk mengetahui secara nyata, realistik apa yang dihadapi ahli pertanian itu, sehingga kurikulum bidang agama juga dapat dibuat seperti halnya bidang pertanian, walau tidak sama persis. Tidak berada di *awang-awang*, di langit, kurang membumi, kurang praktis lulusannya, seperti yang terjadi selama ini, walau tidak semua tentunya.

Deskripsi umum: sesuai dengan Ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi mencakup proses yang menumbuhkembangkan afeksi sebagai berikut:

- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain.

[365] *Ibid.*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Deskriptor kualifikasi SDM (Sumber Daya Manusia) level 6 pada KKNI, yang dihasilkan oleh prodi D-IV atau S1 (bidang pertanian) : deskripsi generik level 6 (paragraf pertama) adalah mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah. Deskripsi spesifik: 1. Mampu memanfaatkan ilmu dan pengetahuan dasar dalam sistem produksi pertanian yang mendasarkan pada ilmu biologi, fisika, kimia, bibometrika, dasar-dasar pengelolaan tanaman dan perlindungan tanaman untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari. 2. Mampu menerapkan IPTEKS di bidang sistem produksi tanaman secara efektif dan produktif berdasarkan prinsip pertanian berkelanjutan baik secara modern maupun yang mengangkat kearifan lokal.

Deskripsi generik level 6 (paragraf kedua), menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan spesialis dan mendalam di bidang-bidang tertentu, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Deskripsi spesifik: 1. Mampu mamahami prinsip-prinsip sosial, budaya, ekonomi, ekologi, hukum, sains dan teknologi dalam pengembangan sistem produksi pertanian yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. 2. Mampu memahami pengelolaan sistem pertanian terpadu yang berkelanjutan dan usaha agribisnis yang ramah lingkungan yang berbasis masyarakat. 3. Mampu melakukan identifikasi, analisis, perumusan dan penyelesaian masalah dalam sistem pertanian yang berkelanjutan.

Deskripsi generik level 6 (paragraf ketiga), mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi. Deskripsi spesifik: mampu merancang dan mengembangkan teknologi produksi secara efektif, produktif, terpadu, berwawasan lingkungan, serta mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, menilai sebuah sistem operasi agribisnis, mengelola resiko ketidakpastian.

Deskripsi generik level 6 (paragraf keempat), bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Deskripsi spesifik: bertanggung jawab pada aktivitas budidaya tanaman secara aman, memproduksi pupuk organik dan anorganik, memproduksi agen hayati, memproduksi benih berkualitas, melakukan konservasi lahan serta mampu menyelesaikan masalah di bidang pertanian.[366]

Mengaca dari kurikulum berbasis KKNI bidang pertanian tersebut, dapatlah dibuat kurikulum PTAI sesuai dengan jurusan atau prodi masing-masing di tiap

[366] http://nasih.files.wordpress.com/2011/02/kkni-pertanian-pertanian.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakultas. Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam (SPI) umpamanya, memiliki kompetensi dasar, kompetensi utama dan kompetensi tambahan. Kompetensi dasar mencakup: 1. pemilikan ilmu tentang Islam serta mampu menerapkannya di masyarakat dalam menjalankan profesinya, 2. ketrampilan berbahasa Indonesia dan asing yang menunjang profesinya, 3. menjadi sarjana muslim yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, 4. memiliki kecakapan partisipatif dan bertanggug jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 5. memiliki sikap ilmiah dan bertanggung jawab terhadap ilmunya.

Kompetensi utama meliputi: 1. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah peradaban Islam, mulai masa klasik sampai masa modern dan posisinya dalam konteks sejarah peradaban dunia, 2. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah Islam Indonesia dan Asia Tenggara dalam berbagai manifestasi intelektual dan kelembagaan sosialnya, 3. memiliki kecakapan dan ketrampilan melakukan penelitian dan membuat laporan penelitian sebagai penerapan metodologi penelitian sejarah dan peradaban, 4. memiliki pengetahuan yang memadai tentang teori sejarah dan penulisan sejarah Islam, 5. memiliki penguasaan terhadap ilmu-ilmu bantu sejarah dan peradaban.

Kompetensi tambahan termasuk: 1. memiliki ketrampilan menggunakan data etnografis, ekonomis, dan teks-teks berbahasa Jawa, Arab dan Inggris sebagai sumber sejarah, 2. menguasai ketrampilan tulis menulis dan teknologi yang dapat mendukung penelitian sejarah peradaban Islam.[367]

Dari keterangan di atas diketahui bahwa kompetensi dasar jurusan SPI ialah menjadi manusia Muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia. Kompetensi utama lulusannya ialah kemampuan menulis sejarah dan peradaban Islam, dan kompetensi tambahan ialah menguasai ilmu bantu sejarah. Dari kompetensi-kompetensi yang dicita-citakan tersebut, maka disusunlah kurikulum yang mengarahkan capaian pembelajaran atau *leraning out comes* untuk dapat menguasai ilmu peradaban Islam dan kemahiran menulis sejarah dan peradaban Islam melalui penelitian sesuai dengan KKNI.

Dapatlah disusun kurikulum SPI berbasis KKNI sebagai berikut:

Deskripsi umum untuk semua prodi sama dengan contoh yang ada pada prodi pertanian tersebut di atas. Deskriptor kualifikasi SDM level 6 pada KKNI prodi SPI yang dihasilkan oleh S1: Deskripsi generik level 6 (paragraf pertama) adalah mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi di bidang keahliannya, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan untuk menyelesaikan masalah. Deskripsi spesifik: 1.mampu memanfaatkan ilmu dan pengetahuan dasar tentang sejarah berdasarkan ilmu bantu sejarah untuk mengetahui perkembangan sejarah peradaban Islam dari masa klasik hingga masa modern. 2. Mampu menerapkan ilmu dan pengetahuan di bidang kesejarahan dan peradaban Islam dengan menulis sejarah Islam lokal, nasional atau internasional/umum.

[367] Hasil Review Kurikulum S1 jurusan SPI, Malang, 21-23 Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Deskripsi generik level 6 (paragraf kedua), menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan spesialis dan mendalam di bidang-bidang tertentu (kesejarahan), serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Deskripsi spesifik: 1. Mampu memahami prinsip-prinsip sosial, budaya, ekonomi, ekologi, hukum, ilmu dan teknologi dalam mengembangkan penulisan sejarah dan peradaban Islam yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. 2. Mampu memahami penulisan sejarah dan Islam yang komprehensif dan memahami hasil usaha penulisan sejarah dan peradaban Islam secara ekonomis. 3. Mampu melakukan identifikasi, analisis, perumusan dan penyelesaian masalah dalam sistem penelitian dan penulisan sejarah dan peradaban Islam yang berkelanjutan.

Deskripsi generik level 6 (paragraf ketiga): mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi. Deskripsi spesifik: mampu merancang dan mengembangkan penelitian sejarah dan peradaban Islam secara efektif, produktif, terpadu, berwawasan lingkungan dan global, serta mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, menilai sebuah model pemasaran hasil penulisan sejarah dan peradaban Islam dan mengelola resiko ketidakpastian.

Deskripsi generik level 6 (paragraf keempat): bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Deskripsi spesifik: bertanggung jawab pada aktifitas penelitian dan penulisan sejarah dan peradaban Islam, menghasilkan karya sejarah dan peradaban Islam dan mampu menyelesaikan masalah di bidang sejarah dan peradaban Islam.

Kurikulum SPI tersebut sebagai contoh untuk menyusun kurikulum prodi-prodi yang lain di PTAI. Prodi Tafsir dan Hadis umpamanya akan berbeda *learning out comes*-nya dari prodi Perbandingan Agama (Fakultas Ushuluddin) atau Bahasa dan Sastera Arab (Adab) atau Pendidikan Agama Islam (Tariyah). Dari kurikulum tersebut dijabarkan lagi menjadi bermacam mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa. Mata kuliah mata kuliah inilah yang memperinci kemauan kurikulum yang akan mengeluarkan *learning out comes* yang diharapkan sesuai dengan KKNI.

PENUTUP

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus diusahakan. Program pemerintah lewat Perpres tentang KKNI diharapkan dapat memperbaiki lulusan perguruan tinggi yang siap kerja, dan dapat diterima di dalam maupun luar negeri dengan adanya penjenjangan kualitas *learning out comes*. Perguruan Tinggi Agama Islam belum terlambat untuk menyusun kurikulum prodi-prodinya berbasis KKNI yang sekarang ini sedang ramai-ramainya dilaksanakan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Kerja bersama antarperguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama untuk menyusun kurikulum tersebut perlu digalang dan direncanakan dengan matang agar menuai hasil yang maksimal. Semoga, amin.

Surabaya, 14 Oktober 2012

Prof.Dr.Ali Murodi, MA.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010/2011 Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA*, Jakarta, 2011.

Furqan, Arif, *Anatomi Problem Kurikulum di PTAI*, *download* dari http://www.ditpertais.net/artikel/arief02.asp

Hamanik, Oemar, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta, Bumi Aksara, cet.xii, 2011.

Hasil Review Kurikulum S1 jurusan SPI, Malang, 21-23 Desember 2011.

IAIN Sunan Ampel, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Tahun 2011*, Surabaya, 2011.

http://nasih.files.wordpress.com/2011/02/kkni-pertanian-pertanian.pdf

http://www.depdagri.go.id/media/documents/2012/02/03/f/i/-1.pdf

http://www.dikti.go.id/files/atur/KKNI/Perpres8-2012-KKNI.pdf

http://www.ranking-ptai.info/Lbg&Fak&ProPtai/

Swara Ditpertais: No.17 Th.II, 18 Oktober 2004, *download* dari http://www.ditpertais.net/swara/warta10-02.asp

Sanjaya, Wina, *Kurikulum Pembelajaran*, Jakarta, Kencana Prenada, cet.iii, 2010.

Sulistyowati, Endah, *Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter*, Jogjakarta, Citra Aji Parama, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id